

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA BEKASI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNGJAWAB
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi Tk. Kota, Tk. Propinsi dan Tk. Nasional	Orang	Berdasarkan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 29 Tahun 2016	Dihitung dari jumlah pemuda berprestasi Tk.Kota, Tk.Propinsi dan Tk. Nasional	Keg. Pemuda Pelopor dan Paskibra	Dispora
2	Meningkatnya Prestasi Olahraga di Kota Bekasi	1 Jumlah perolehan medali Tk.Propinsi	Medali	Berdasarkan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 29 Tahun 2016	Berdasarkan jumlah medali yang diperoleh Tk. propinsi	Porpemda Haornas, Otrad Popda, Popwil, Popnas, PON	Dispora
		2 Jumlah stadion yang representatif	Gedung	Berdasarkan peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No 29 Tahun 2016	Berdasarkan jumlah Stadion yang representative yang ada di Kota Bekasi	Stadion representativ e yang dimiliki Kota Bekasi	Dispora
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Berdasarkan Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untu meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan public Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui (IKM)	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden. Penerima layanan Dispora adalah masyarakat. Oleh karena itu Perangkat Daerah sebagai respnden dalam Survey Pelayanan Publik Dispora		Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			PENANGGUNGJAWAB
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Nilai Evaluasi AKIP	angka	Berdasarkan Perpres RI no. 29 Th. 2014 tentang Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu nilai peringkat	Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP. Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>85), A(>75-85), B(>65-75), CC(>50-65), C(>30-50) dan D(0-30)		Sekretariat
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	Dalam rangka peningkatan pelayanan public perlu adanya evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah	Jumlah penngaduan yang ditindalanjuti dibagi jumlah pengaduan dibagi seratus persen		

Bekasi,

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA BEKASI**

Drs. TEDI HAFNI TRESNADI, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19621021 198503 1 004